

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut.

1. Pada tahun 2012, DPRD Kabupaten Ngada telah berhasil menyusun dan mengesahkan lima peraturan daerah inisiatif. Pembentukan dan penetapan peraturan daerah inisiatif ini telah sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ngada Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anggota DPRD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Lima peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut.
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015.
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penertiban Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pada Periode 2009-2014 terdapat 49 buah peraturan daerah yang telah dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Ngada. Dari 49 peraturan daerah ini lima diantaranya adalah perda inisiatif DPRD. Berdasarkan uraian tersebut kinerja DPRD Kabupaten Ngada periode 2009-2014 dalam membentuk peraturan daerah inisiatif secara kuantitatif tidak optimal.

2. Beberapa kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Ngada dalam melaksanakan hak inisiatifnya adalah sebagai berikut.
  - a. Kemampuan dan kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kurang memadai
  - b. Pola Pikir Anggota DPRD
  - c. Kurangnya pengalaman Anggota DPRD
  - d. Kurangnya Penguasaan Data dan Informasi Oleh Anggota DPRD
  - e. Kurangnya partisipasi masyarakat
3. Selama periode 2009-2014 pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam membentuk peraturan daerah inisiatif oleh DPRD Kabupaten Ngada masih belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam mewujudkan DPRD yang lebih produktif dalam pembangunan daerah dengan membentuk peraturan daerah inisiatif perlu adanya

pembaharuan sebagai suatu konsep bagi anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah inisiatif.

Salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti seseorang dituntut untuk profesionalitas dalam bidangnya. Hal ini berlaku juga bagi setiap anggota legislatif, sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota legislatif dengan baik dan benar.

Konsep ideal menurut penulis bagi anggota DPRD dalam membentuk peraturan daerah agar dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan berkuantitas adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia anggota DPRD melalui pendidikan politik oleh partai politisi maupun bimbingan teknis oleh lembaga DPRD itu sendiri.
2. Rakyat harus lebih cerdas dalam memilih para wakilnya yang nantinya akan mewakili rakyat dalam mengambil keputusan politik.
3. Anggota DPRD harus dapat mengoptimalkan aturan yang sudah ada.

## **B. Saran**

Sebagai anggota DPRD, para anggota legislatif merupakan representasi dari masyarakat yang memilihnya. Oleh karena itu pada prinsipnya, anggota DPRD harus dapat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dengan optimal bukan hanya sekedar sebagai “kampanye terselubung” agar dapat terpilih kembali pada periode berikutnya. Fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan harus dilaksanakan secara optimal sehingga menjadi anggota DPRD bukan sekedar perwakilan rakyat saja tetapi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Konsep-konsep yang diuraikan di atas, diharapkan agar menjadi perhatian bagi para anggota DPRD Kabupaten Ngada dan juga masyarakat Kabupaten Ngada agar kedepannya kinerja anggota DPRD lebih optimal dari pada periode-periode sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, vol. 1, Jakarta, Kencana
- Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Pusat Studi Hukum.
- ..... 1994, *Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Yudoyono, 2001, *Otonomi Daerah Desentralisasi Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan DPRD*, cet. ke 2, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Ellydar Chaidin, Sudi Fahmi, 2010, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Yogyakarta, Total Media.
- H. Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, cet. ke 1, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- H.A.W Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV.Haji Masagung.
- I Gde Pantja Astawa, 2013, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung, PT. Almuni.
- Inu Kencana dan Azhari, 2008, *Sistem Politik Indonesia*, cet. ke, 4, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat MK.
- King Faisal Sulaiman, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, cet. ke 1, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Krisna D. Darumurti, dkk, 2000, *Otonomi Daerah: Perkembangan, Pemikiran dan Pelaksanaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Lili Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, cet. ke 1, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Maria Farida Indarti S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, cet. ke 7, Yogyakarta, Kanisius.
- ..... 2010, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gema Medya.
- Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI; Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Cet. I, Nusa Media, Bandung.
- ..... 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusa Media.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- P. Sharma, 2004, *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*, Jakarta, Yayasan Menara Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet. ke 8, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Raisul Muttaqien, 2011, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media.
- Riawan Tjandra W, Kresno Budi Darsono, 2009, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit UAJY.
- Sayuti Una, 2004, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah, Menurut Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1989, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Solly Lubis. M, 1983, *Pergeseran Politik dan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Sukarna, 1990, *Sistem Politik*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Ubaidillah U, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Press Jakarta.

**Jurnal:**

Iza Rumasta RS, 2011, *Relevansi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembentukan Perundang-Undangan Yang Responsif*

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.

**Website:**

<http://www.slideshare.net/rudybochahbochah/ajaran-otonomi-daerah>

<http://www.slideshare.net/kakakliaashesnoopy/makalah-desentralisasi-dan-otonomi-daerah>

[http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s\\_pkn\\_0605917\\_chapter2\(1\).pdf](http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0605917_chapter2(1).pdf)

